



**Laporan Bulanan Sekretariat Utama  
Bulan Maret  
2025**

## KATA PENGANTAR

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu penting karena bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga pemerintah mengimplementasikan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aplikasi SAKIP ini digunakan untuk mengobservasi dan menilai kinerja suatu instansi pemerintah. Badan Pangan Nasional menggunakan aplikasi SAKIP sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang dipergunakan. Sekretariat Utama yang bertugas mendukung manajemen Badan Pangan Nasional wajib mengisi aplikasi SAKIP. Pengisian aplikasi SAKIP ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan aktualisasi program atau kegiatan di Sekretariat Utama di sepanjang tahun 2025. Tahap berikutnya menyusun Laporan Bulanan Sekretariat Utama yang berisi aktualisasi dari aktivitas, program dan kegiatan yang terjadi di Badan Pangan Nasional. Laporan ini disusun secara bulanan sehingga pelaporan kegiatan atau program yang sudah berlangsung di bulan itu. Selain itu, bahan dan data yang dipakai pada aplikasi SAKIP ini menggunakan instrumen penilaian yang berpatokan dengan implementasi dan realisasi kegiatan atau program yang dilaksanakan. Hasil dari dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi untuk laporan bulan berikutnya. Sekretariat utama mendapatkan alokasi berdasarkan aturan alokasi dalam BA 125 milik Badan Pangan Nasional dan uraian alokasi untuk Program Dukungan Manajemen serta diprioritaskan untuk pembayaran honor dan operasional kantor. Pemantauan atas penggunaan alokasi yang aturan dalam bulan Maret tahun 2025 harus tetap terlaksana agar efisien dan efektif. Kami berharap laporan ini bisa berguna untuk seluruh pihak dan sebagai referensi buat pemugaran aplikasi aktivitas kedepan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan pada rangka menyajikan laporan.

Jakarta, April 2025



**Sarwo Edhy**

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                    | ii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                        | iii |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                      | iv  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                     | v   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                   | vi  |
| <b>BAB I: Pendahuluan</b> .....                | 1   |
| <b>1.1 Latar belakang</b> .....                | 2   |
| <b>1.2 Tujuan</b> .....                        | 4   |
| <b>1.3 Metodologi Penyusunan Laporan</b> ..... | 4   |
| <b>BAB II: Rencana Kerja Output</b> .....      | 5   |
| <b>BAB III: Pelaksanaan Kegiatan</b> .....     | 8   |
| <b>3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan</b> .....  | 9   |
| <b>4.1 Kesimpulan</b> .....                    | 21  |
| <b>4.3 Rekomendasi</b> .....                   | 21  |

## DAFTAR TABEL

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Maret 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-1<br/>Tanggal 21 Maret 2025 .....</b>              | <b>6</b>  |
| <b>Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Maret Tahun 2025 Per Output dan<br/>Komponen Lingkup Sekretariat Utama .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Maret Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan<br/>Pangan Nasional .....</b>                  | <b>11</b> |

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1. Realisasi dan Target Sekretariat Utama Tahun 2025 ..... 11**

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Lampiran 1. DIPA Revisi 1 – 21 Maret 2025 .....</b>          | <b>22</b> |
| <b>Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan 2025 .....</b> | <b>23</b> |

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar belakang**

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk masyarakat. Hal ini tergambar dari Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 yang menyatakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan yang dipercaya masyarakat perlu mengatur akan kebijakan terhadap pangan. Pemerintah mengatur tentang kebijakan pangan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dijelaskan tentang tugas, susunan badan, dan tata kelola dari Badan Pangan Nasional.

Fungsi yang diutamakan untuk Badan Pangan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Oleh sebab itu, Badan Pangan Nasional berfokus untuk mengatur kebijakan di bidang pangan. Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan BUMN di bidang pangan dalam mengerjakan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah, Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola sistem pangan nasional yang transparan, akuntabel, loyal dan berkelanjutan serta berkoordinasi dengan instansi-instansi lain baik itu kementerian-kementerian lain maupun universitas-universitas untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagaimana visi Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022.

Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:

- 1 Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 2 Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi;
- 3 Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- 4 Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional.

Sekretariat Utama

Laporan bulanan dibuat Badan Pangan Nasional secara periodik sebagai bentuk implementasi instansi negara yang bertanggung jawab atas anggaran yang digunakan untuk membantu masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pemantauan, jejak program atau kegiatan yang telah terlaksana dan evaluasi yang menggambarkan pencapaian dan bentuk realisasi terhadap target kinerja organisasi dalam periode bulanan. Pemantauan dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan pencapaian target dapat berjalan sesuai yang ditetapkan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi permasalahan yang akan timbul di periode mendatang.

Hasil atas peninjauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan dan pendayagunaan anggaran kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan Maret 2025

dituangkan dalam bentuk laporan peninjauan dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat Utama bulan Maret 2025. Laporan ini sebagai catatan dokumentasi realisasi fisik dan keuangan selama bulan Maret 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Sekretariat Utama tahun 2025 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan dan merepresentasikan program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkup Sekretariat Utama di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Utama pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan, diantaranya:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Sekretariat Utama periode bulan Maret 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target periode bulan Maret 2025.

## **1.3 Metodologi Penyusunan Laporan**

Metodologi penyusunan laporan meliputi:

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dari Unit Kerja Eselon (UKE) 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA OUTPUT**

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja pada Sekretariat Utama selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Maret 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian Rincian Output (RO) dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi ke-1 pada bulan Maret 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Maret ditargetkan sebesar **7,56%** Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Maret 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-1**

| Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen  |   | Alokasi Tahun 2025     |       | Target Maret th. 2025            |       |
|---|---|------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Program, Kegiatan dan KRO   | RO/Output                                   | Anggaran (Rp)          | Fisik | Keuangan<br><b>7,56%</b><br>(Rp) | Fisik |
| <b>WA-Program Dukungan Manajemen</b>                                    |   | <b>108,854,211,000</b> |       | <b>8,229,378,352</b>             | -     |
| <b>6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional</b> |   |                        |       |                                  |       |
| AEC-Kerja sama  | Kerja Sama Bidang Pangan                    | 824,972,000            |       | 62,361,859                       |       |
| EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal                                 | Layanan BMN                                 | 325,011,000            |       | 24,586,832                       |       |
|   | Layanan Hukum                               | 686,492,000            |       | 51,949,735                       |       |
|   | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi   | 2,373,720,000          |       | 179,483,232                      |       |
|   | Layanan Protokoler                          | 580,600,000            |       | 43,924,560                       |       |
|   | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 1,070,261,000          |       | 80,944,744                       |       |
|   | Layanan Umum                                | 7,844,720,000          |       | 592,210,032                      |       |
|   | Layanan Perkantoran                         | 78,698,135,000         |       | 5,948,648,406                    |       |
| EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal                               | Layanan Sarana Internal                     | 1,314,054,000          |       | 99,354,482                       |       |

|  |  |               |  |             |  |
|--|--|---------------|--|-------------|--|
| .EBC-Layanan Manajemen SDM Internal    | Layanan Manajemen SDM                    | 1,887,686,000 |  | 142,693,162 |  |
| EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal | Layanan Perencanaan dan Penganggaran     | 5,329,682,000 |  | 402,908,959 |  |
|  | Layanan Pemantauan dan Evaluasi          | 771,904,000   |  | 58,387,030  |  |
|  | Layanan Manajemen Keuangan               | 1,094,046,000 |  | 82,741,882  |  |
|  | Layanan Audit Internal                   | 2,327,594,000 |  | 176,005,994 |  |
| PAD-Peraturan Presiden                 | Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional | 270,775,000   |  | 20,474,580  |  |
| QMA-Data dan Informasi Publik          | Data dan Informasi Pangan                | 3,232,560,000 |  | 244,496,736 |  |
| UAB-Sistem Informasi Pemerintahan      | Sistem Informasi Pangan dan Gizi         | 221,999,000   |  | 16,778,924  |  |

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

### 3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 53 output/RO dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 193,157,991,000,-** untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan Maret Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per belanja dan per kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel 2 dan tabel 3 berikut:

**Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Maret Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Sekretariat Utama**

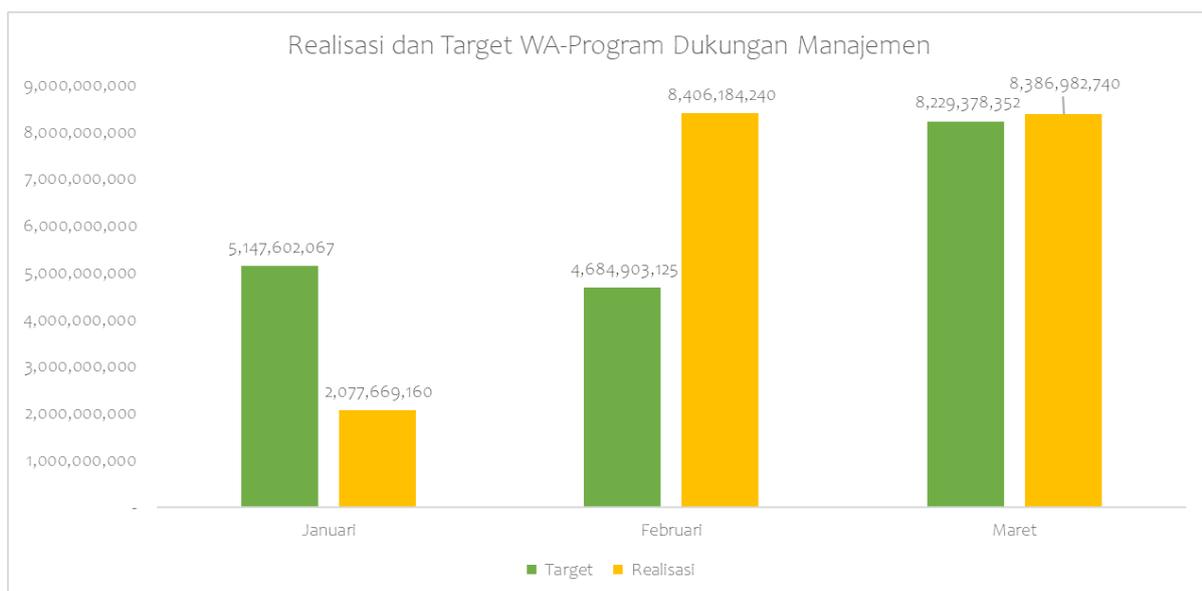
| Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen  |  | Target<br>(7,56%)    |       | Realisasi<br>(SP2D)  |       |
|---|--|----------------------|-------|----------------------|-------|
| Program, Kegiatan dan KRO   | RO/Output  | Keuangan<br>(Rp)     | Fisik | Keuangan<br>(Rp)     | Fisik |
| <b>WA-Program Dukungan Manajemen</b>  |  |                      |       |                      |       |
| <b>6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya<br/>Badan Pangan Nasional</b> |  | <b>8,229,378,352</b> |       | <b>8,386,982,740</b> | -     |
| AEC-Kerja sama  | Kerja Sama<br>Bidang Pangan                          | 62,361,859           |       | 1,458,000            |       |
| EBA-Layanan Dukungan Manajemen<br>Internal                                  | Layanan BMN  | 24,586,832           |       | 45,580,000           |       |
|   | Layanan<br>Hukum                                     | 51,949,735           |       | 11,185,000           |       |
|   | Layanan<br>Hubungan<br>Masyarakat dan<br>Informasi   | 179,483,232          |       | 115,821,815          |       |
|   | Layanan<br>Protokoler                                | 43,924,560           |       | 101,937,552          |       |
|   | Layanan<br>Organisasi dan<br>Tata Kelola<br>Internal | 80,944,744           |       | 24,258,000           |       |
|   | Layanan Umum   | 592,210,032          |       | 413,319,652          |       |

|   |  |               |  |               |  |
|---|--|---------------|--|---------------|--|
|   | Layanan<br>Perkantoran                   | 5,948,648,406 |  | 6,614,448,565 |  |
| EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal | Layanan Sarana Internal                  | 99,354,482    |  | 0             |  |
| .EBC-Layanan Manajemen SDM Internal       | Layanan Manajemen SDM                    | 142,693,162   |  | 15,187,500    |  |
| EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal    | Layanan Perencanaan dan Penganggaran     | 402,908,959   |  | 85,935,593    |  |
|   | Layanan Pemantauan dan Evaluasi          | 58,387,030    |  | 32,379,267    |  |
|   | Layanan Manajemen Keuangan               | 82,741,882    |  | 262,052,900   |  |
|   | Layanan Audit Internal                   | 176,005,994   |  | 418,928,284   |  |
| PAD-Peraturan Presiden                    | Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional | 20,474,580    |  | 0             |  |
| QMA-Data dan Informasi Publik             | Data dan Informasi Pangan                | 244,496,736   |  | 219,035,125   |  |
| UAB-Sistem Informasi Pemerintahan         | Sistem Informasi Pangan dan Gizi         | 16,778,924    |  | 25,455,487    |  |

**Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Maret Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional**

| Program dan Kegiatan   | Target 7,56% (Rp) | Realisasi SP2D (Rp) | % (Dari Target) |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| Badan Pangan Nasional  | 14,616,739,380    | 9,950,215,598       | 68.07%          |
| HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 6,372,354,168     | 1,563,232,858       | 24.53%          |
| WA-Program Dukungan Manajemen                                  | 8,228,351,356     | 8,386,982,740       | 101.93%         |

Dari tabel 3 diatas, realisasi keuangan Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Bulan Maret Tahun 2025 telah terealisasi sebesar **Rp. 8,386,982,740 (101.93%)** dari target sebesar **Rp. 8,228,351,356 (7,56%)**. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka target, realisasi dan PAGU WA-Program Dukungan Manajemen akan terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Realisasi dan Target Sekretariat Utama Tahun 2025

### 3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama pada periode bulan Maret Tahun 2025 telah ter-realisis anggaran sebesar 8,386,982,740 dengan prioritas kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

#### Sekretaris Utama

#### 6 Maret 2025 - NFA Perkuat Peran ASN Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan



Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan perlu didukung oleh semua pihak, tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah. Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Sarwo Edhy ketika menjadi pembicara dalam diskusi ASN Belajar Seri 9: yang bertajuk "Peran Strategis ASN: Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan" pada Kamis (6/3/2025) yang disiarkan secara daring.

"Spirit dari penyelenggaraan pangan adalah bagaimana kita dapat berdaulat dan mandiri pangan, yang pada akhirnya menciptakan ketahanan pangan

yang kokoh, dan ASN sebagai unsur pemerintahan punya peran penting dalam mendukung terwujudnya hal tersebut," ujarnya.

Sarwo menekankan, peran tersebut dimulai dari pentingnya memahami secara utuh konsep ketahanan pangan. Bahwa ketahanan pangan tidak hanya tentang produksi, tetapi juga mencakup aspek distribusi, stabilisasi harga, dan aspek pemanfaatan yang berkelanjutan yang dititikberatkan pada penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Adapun pada momentum Ramadan saat ini, pemerintah berfokus pada menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya pangan pokok strategis yang memang memiliki andil terhadap inflasi, antara lain beras, jagung, kedelai, gula, bawang, daging, dan minyak goreng.

"Pemerintah terus berupaya menjaga stabilisasi harga dengan berbagai kebijakan, salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Ketika ada lonjakan harga pangan di suatu daerah, pemerintah hadir untuk melakukan intervensi pasar agar harga terkendali," jelasnya.

Kuncinya pada kecukupan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi stabilisasi pangan. Karena itu, NFA terus mendorong penguatan stok CPP berbasis produksi dalam negeri dengan mengoptimalkan peran dan fungsi BUMN Pangan sebagai offtaker.

Selain itu, Sarwo turut menyoroti pentingnya diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pokok. Indonesia memiliki sumber daya pangan yang sangat beragam, sehingga potensi ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk menjaga ketahanan pangan berkelanjutan.

Untuk itu, kunci penting dari membangun tata kelola pangan tersebut yakni membangun sinergi dan kolaborasi yang erat dengan semua stakeholder terkait mulai dari kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, asosiasi dan pelaku usaha, BUMN, hingga kalangan media.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Ramliyanto memaparkan tantangan pangan yang dihadapi dunia saat ini. Ia menyebut, berdasarkan data FAO (Food and Agriculture Organization) terdapat 4 komponen utama ketahanan pangan yang harus dijaga, antara lain ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan.

"Jika salah satu dari komponen di atas terganggu, maka kerawanan pangan bisa saja terjadi. Oleh karena itu upaya ketahanan pangan yang berkelanjutan harus mencakup produksi yang cukup distribusi yang merata daya beli masyarakat yang kuat serta pola konsumsi yang sehat," ucapnya.

### **13 Maret 2025 - Diskusi dengan Tim Stranas PK, Badan Pangan Nasional Dorong Peranan BUMD sebagai Enabler Stabilitas Pangan**



JAKARTA – Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audiensi dengan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA). Tim Stranas PK mengusung 15 aksi pencegahan korupsi yang salah satunya terkait dengan penguatan kolaborasi dan sinergitas Badan/BUMN dengan BUMD di sektor pangan.

"Dua tahun sebelumnya kami ada 15 aksi, salah satu aksi terkait dengan sinergisitas BUMD. Hari ini kami coba diskusi dengan teman-teman di Badan

Pangan Nasional. Kira-kira area yang bisa kami dorong (apa saja)," ucap Koordinator Harian Stranas PK Didik mengawali diskusi yang diselenggarakan di Kantor NFA, Jakarta pada Kamis (13/3/2025).

"Nah kalau yang tahun lalu, kami masuk di isu pengelolaan sampah. Jadi kami bantu koordinasikan pengelolaan sampah, supaya pembiayaannya tidak terlalu memberatkan teman-teman di pemerintah daerah," terang Didik.

Untuk diketahui, Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) terdiri dari 5 kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan KPK sebagai koordinator Timnas PK.

Dari itu, Timnas PK menetapkan aksi pencegahan korupsi setiap 2 (dua) tahun sekali melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Timnas PK tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2025-2026 pada 12 Februari 2025. Salah satunya berupa output penguatan kolaborasi dan sinergitas Badan/BUMN dengan BUMD di sektor strategis yakni pertambangan, pengelolaan sampah, minyak gas, dan pangan.

Dalam forum tukar gagasan hari ini, Plt Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy menegaskan bahwa selama ini NFA telah banyak bekerjasama dengan BUMD di berbagai daerah. Pelbagai program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diinisiasi NFA tentunya banyak melibatkan BUMD di daerah yang disasar.

"Jadi kami sudah merintis dengan membangun kios-kios pangan di setiap kabupaten/kota. Rencana pengembangan ke depan bisa dikerjasamakan dengan BUMD. Kemudian ada FDP (Fasilitasi Distribusi Pangan), ini juga yang melaksanakannya BUMD dengan anggaran kita," papar Sarwo.

"Lalu GPM (Gerakan Pangan Murah) yang diinisiasi Badan Pangan Nasional dengan dinas pangan di daerah, itu juga sering melibatkan BUMD. Oleh karena itu, BUMD sangat diharapkan dapat pula mengelola Cadangan

Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), misalnya beras. Kalau di pusat sudah ada Bulog," lanjutnya.

Selanjutnya Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengelaborasi pandangannya bahwa peran BUMD sebagai enabler stabilitas mulai dari hulu hingga hilir, penting untuk diperkuat. Ketut bilang BUMD di Jakarta bisa jadi kiblat bagi pemerintah daerah lainnya.

"Hal yang perlu kita kejar dulu mungkin lebih ke peran BUMD. Artinya lihat contohnya di Jakarta yang sudah punya beberapa BUMD, khususnya di bidang pangan. Jakarta dengan Food Station-nya itu bisa mengendalikan harga dan inflasi. Mereka bisa mengukur berapa pasokan normalnya. Begitu pasokan menurun, mereka akan mulai berhati-hati," urai Ketut.

"Nah kita dorong teman-teman di provinsi lain memiliki hal yang sama. Badan Pangan Nasional tatkala ada intervensi pengendalian ke pasar seperti FDP dan GPM, bisa dilakukan oleh BUMD. Kemudian sebagai stabilisator, tatkala harga rendah, BUMD datang ke petani dan peternak di daerahnya untuk menyerap. Tatkala harga tinggi di konsumen, BUMD juga datang untuk menstabilkan. Ini peran yang harus kita perkuat," paparnya.

Sebagai informasi, NFA sepanjang tahun 2024 telah memasifkan GPM hingga mencapai 9.547 kali di 38 provinsi dan 480 kabupaten/kota. Sementara FDP sepanjang 2024 mempunyai realisasi mencapai 750 ton yang terdiri dari berbagai pangan pokok strategis. Tahun ini FDP ditargetkan dapat menyentuh 1.000 ton.

Deputi NFA Ketut turut mengungkapkan kekhawatirannya apabila BUMD belum mampu berperan banyak, bisa saja mengundang oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan secara sepihak saja.

"Ini karena kalau BUMD tidak bergerak di area yang perlu stabilisasi ini, maka hiduplah oknum-oknum tadi, seperti oknum pedagang yang mencari untung begitu. Mereka lihat BUMD di daerahnya lemah, maka kita disikat dengan harga naik," bebarnya.

"Dengan Stranas PK hari ini, tentu kami mengapresiasi karena bisa membantu lebih mendorong ke pemerintah daerah. Bagaimana membentuk concern di pangan. Bagaimana produk pangan hasil petani lokal bisa dikendalikan, bisa dijaga, sehingga BUMD mampu jadi pahlawan di sana," tutup Ketut.

Ditemui terpisah, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga menghaturkan dukungannya terhadap inisiasi Tim Stranas PK yang ingin membantu memperkuat ekosistem pangan nasional. Arief menuturkan upaya penguatan BUMD oleh pemerintah daerah akan seiring sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang berkomitmen mengoptimalkan produksi dalam negeri.

"Target swasembada pangan yang digagas Bapak Presiden Prabowo Subianto itu memang harus secara gotong royong kita wujudkan. Mulai dari pemerintah pusat dengan BUMN-nya lalu pemerintah daerah dengan BUMD-nya. Semua perlu dilibatkan agar swasembada cepat tercapai dan Indonesia berjaya," tandasnya.

Dalam forum diskusi hari ini dihadiri juga oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri Yudia Ramli; Tenaga Ahli Stranas PK Sudrajat; Tenaga Ahli Stranas PK Juhanah; Tenaga Ahli Monev Stranas PK Sjahril Sangaji; Direktur SPHP NFA Maino Dwi Hartono; Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani; Direktur Ketersediaan Pangan NFA Indra Wijayanto, dan Inspektur NFA Imron Rosjidi.

## 14 Maret 2025 - Badan Pangan Nasional dan KADIN Indonesia Perkuat Sinergi Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional



JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, pada Jumat (14/3/2025), Badan Pangan Nasional menyepakati Kesepahaman Bersama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia tentang Sinergitas Program dan Kegiatan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy yang mewakili Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam seremoni penandatanganan kesepahaman tersebut menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pangan yang berkelanjutan.

“Kolaborasi dengan KADIN Indonesia merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui kerja sama ini, kami optimis dapat mempercepat pencapaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang berkaitan dengan sektor pangan dan upaya pencapaian swasembada pangan,” ujar Sarwo.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia turut serta dalam merealisasikan target pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif konkret, seperti yang dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan ini.

"Hari ini kita menandatangani MoU dengan Badan Pangan Nasional, dan kita patut syukuri bahwa Pak Arief Prasetyo Adi juga merupakan ketua Badan Pangan di Kadin. Tentu saja kerja sama ke depannya akan sangat sinkron. Kita tahu bahwa sektor pangan menjadi salah satu fokus perhatian Bapak Prabowo, bahkan bisa dibilang ini adalah salah satu program yang paling penting karena kesejahteraan masyarakat luas akan tercapai dan juga terealisasi dari pertanian, peternakan, dan perikanan." ujar Anindya.

Melalui sinergi ini, diharapkan ketahanan pangan nasional semakin kuat dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Badan Pangan Nasional akan terus mendorong berbagai inisiatif yang melibatkan sektor swasta dalam menciptakan sistem pangan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Sekretariat Utama pada periode bulan Maret 2025 sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama adalah Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 108,854,211,000,- dari total pagu Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 193,157,991,000,- yang terdiri dari 6 Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan 15 Rincian Output (RO).
2. Realisasi keuangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan Maret 2025 mencapai Rp. 8,386,982,740 (101,93%) dari target sebesar 4,684,903,125 (7,56%)

#### **4.2 Permasalahan**

Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala minor yang muncul selama proses berlangsung. Kendala tersebut bersifat situasional dan dapat diatasi dengan penyesuaian serta koordinasi yang tepat, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap hasil akhir kegiatan.

#### **4.3 Rekomendasi**

Tindak lanjut atas permasalahan di atas antara lain:

Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan di masa mendatang, disarankan agar koordinasi antar pihak terus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi kendala tak terduga yang mungkin muncul. Selain itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan juga perlu dipertahankan agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika situasional. Evaluasi rutin dan komunikasi yang terbuka akan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan kegiatan selanjutnya.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. DIPA Revisi 1 Tanggal 21 Maret 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

### SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025



05.00714003-0000-7731

NOMOR : SP DIPA- 125.01.1.690590/2025

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

#### A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

#### B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (125)    | BADAN PANGAN NASIONAL  |
| 2. Unit Organisasi            | : (01)     | BADAN PANGAN NASIONAL  |
| 3. Provinsi                   | : (01)     | DKI JAKARTA  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (690590) | BADAN PANGAN NASIONAL  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 275.718.455.000 ( DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN BELAS JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH ) |

#### Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :  
04 EKONOMI  
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

#### Terlampir

#### C. Sumber Dana Berasal Dari :

|                               |     |                 |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 275.718.455.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        |     |                 | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0               | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |                 | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0               | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0               | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0               | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

#### D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- |                   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (130) Rp. | 275.718.455.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|

#### E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
SUHAHASIL NAZARA  
NIP. 197011231990031009

## Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan Maret 2025

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PANGAN NASIONAL PUSAT  
Data s/d tanggal 31 Maret 2025

| URAIAN  | PAGU REVISI            | PAGU BLOKIR | PERIODE INI          | %             | REALISASI SP2D        | %             | SISA ANGGARAN          |
|---|------------------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>  | <b>193,157,991,000</b> | <b>0</b>    | <b>9,950,215,598</b> | <b>5.15%</b>  | <b>23,953,270,639</b> | <b>12.40%</b> | <b>183,207,775,402</b> |
| <b>W A Program Dukungan Manajemen</b>   | <b>108,854,211,000</b> | <b>0</b>    | <b>8,386,982,740</b> | <b>7.70%</b>  | <b>20,281,087,697</b> | <b>18.63%</b> | <b>100,467,228,260</b> |
| <b>WA.6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional</b>                              | <b>108,854,211,000</b> | <b>0</b>    | <b>8,386,982,740</b> | <b>7.70%</b>  | <b>20,281,087,697</b> | <b>18.63%</b> | <b>100,467,228,260</b> |
| <b>AEC Kerja sama</b>   | <b>824,972,000</b>     | <b>0</b>    | <b>1,458,000</b>     | <b>0.18%</b>  | <b>22,622,748</b>     | <b>2.74%</b>  | <b>823,514,000</b>     |
| <b>AEC.001 Kerja Sama Bidang Pangan</b>   | <b>824,972,000</b>     | <b>0</b>    | <b>1,458,000</b>     | <b>0.18%</b>  | <b>22,622,748</b>     | <b>2.74%</b>  | <b>823,514,000</b>     |
| <b>101 Kerja Sama Bidang Pangan</b>   | <b>824,972,000</b>     | <b>0</b>    | <b>1,458,000</b>     | <b>0.18%</b>  | <b>22,622,748</b>     | <b>2.74%</b>  | <b>823,514,000</b>     |
| <b>101.0A Kerjasama di Bidang Pangan</b>  | <b>824,972,000</b>     | <b>0</b>    | <b>1,458,000</b>     | <b>0.18%</b>  | <b>22,622,748</b>     | <b>2.74%</b>  | <b>823,514,000</b>     |
| <b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>  | <b>91,578,938,000</b>  | <b>0</b>    | <b>7,326,550,584</b> | <b>8.00%</b>  | <b>18,296,035,056</b> | <b>19.98%</b> | <b>84,252,388,416</b>  |
| <b>EBA.956 Layanan BMN</b>  | <b>325,011,000</b>     | <b>0</b>    | <b>45,580,000</b>    | <b>14.02%</b> | <b>100,588,200</b>    | <b>30.95%</b> | <b>279,431,000</b>     |
| <b>101 Layanan BMN dan Pengadaan</b>  | <b>325,011,000</b>     | <b>0</b>    | <b>45,580,000</b>    | <b>14.02%</b> | <b>100,588,200</b>    | <b>30.95%</b> | <b>279,431,000</b>     |
| <b>101.0A Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>   | <b>153,140,000</b>     | <b>0</b>    | <b>20,580,000</b>    | <b>13.44%</b> | <b>59,257,200</b>     | <b>38.69%</b> | <b>132,560,000</b>     |
| <b>101.0B Layanan Pengelolaan BMN</b>   | <b>171,871,000</b>     | <b>0</b>    | <b>25,000,000</b>    | <b>14.55%</b> | <b>41,331,000</b>     | <b>24.05%</b> | <b>146,871,000</b>     |
| <b>EBA.957 Layanan Hukum</b>  | <b>686,492,000</b>     | <b>0</b>    | <b>11,185,000</b>    | <b>1.63%</b>  | <b>33,586,000</b>     | <b>4.89%</b>  | <b>675,307,000</b>     |
| <b>101 Layanan Hukum</b>  | <b>686,492,000</b>     | <b>0</b>    | <b>11,185,000</b>    | <b>1.63%</b>  | <b>33,586,000</b>     | <b>4.89%</b>  | <b>675,307,000</b>     |
| <b>101.0A Layanan Hukum</b>   | <b>351,350,000</b>     | <b>0</b>    | <b>11,185,000</b>    | <b>3.18%</b>  | <b>33,586,000</b>     | <b>9.56%</b>  | <b>340,165,000</b>     |
| <b>101.0B Layanan Advokasi Hukum</b>  | <b>181,542,000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>181,542,000</b>     |
| <b>101.0C Layanan Penguatan JDJH, IRH dan IKK</b>   | <b>153,600,000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>153,600,000</b>     |
| <b>EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</b>  | <b>2,373,720,000</b>   | <b>0</b>    | <b>115,821,815</b>   | <b>4.88%</b>  | <b>251,056,035</b>    | <b>10.58%</b> | <b>2,257,898,185</b>   |
| <b>101 Layanan Hubungan Masyarakat</b>  | <b>2,373,720,000</b>   | <b>0</b>    | <b>115,821,815</b>   | <b>4.88%</b>  | <b>251,056,035</b>    | <b>10.58%</b> | <b>2,257,898,185</b>   |
| <b>101.0A Layanan Humas dan Informasi Publik</b>  | <b>2,373,720,000</b>   | <b>0</b>    | <b>115,821,815</b>   | <b>4.88%</b>  | <b>251,056,035</b>    | <b>10.58%</b> | <b>2,257,898,185</b>   |
| <b>EBA.959 Layanan Protokol</b>   | <b>580,600,000</b>     | <b>0</b>    | <b>101,937,552</b>   | <b>17.56%</b> | <b>146,807,900</b>    | <b>25.29%</b> | <b>478,662,448</b>     |
| <b>101 Layanan Protokol</b>   | <b>580,600,000</b>     | <b>0</b>    | <b>101,937,552</b>   | <b>17.56%</b> | <b>146,807,900</b>    | <b>25.29%</b> | <b>478,662,448</b>     |
| <b>101.0A Layanan Keprotokoleraan</b>   | <b>580,600,000</b>     | <b>0</b>    | <b>101,937,552</b>   | <b>17.56%</b> | <b>146,807,900</b>    | <b>25.29%</b> | <b>478,662,448</b>     |
| <b>EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>  | <b>1,070,261,000</b>   | <b>0</b>    | <b>24,258,000</b>    | <b>2.27%</b>  | <b>104,645,290</b>    | <b>9.78%</b>  | <b>1,046,003,000</b>   |
| <b>101 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>  | <b>1,070,261,000</b>   | <b>0</b>    | <b>24,258,000</b>    | <b>2.27%</b>  | <b>104,645,290</b>    | <b>9.78%</b>  | <b>1,046,003,000</b>   |
| <b>101.0A Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Kelola</b>  | <b>433,620,000</b>     | <b>0</b>    | <b>4,158,000</b>     | <b>0.96%</b>  | <b>26,366,600</b>     | <b>6.08%</b>  | <b>429,462,000</b>     |
| <b>101.0B Layanan Reformasi Birokrasi</b>   | <b>188,150,000</b>     | <b>0</b>    | <b>20,100,000</b>    | <b>10.68%</b> | <b>29,500,000</b>     | <b>15.68%</b> | <b>168,050,000</b>     |
| <b>101.0C Pengembangan Jabatan Fungsional</b>   | <b>448,491,000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>48,778,690</b>     | <b>10.88%</b> | <b>448,491,000</b>     |
| <b>EBA.962 Layanan Umum</b>   | <b>7,844,720,000</b>   | <b>0</b>    | <b>413,319,652</b>   | <b>5.27%</b>  | <b>1,354,611,208</b>  | <b>17.27%</b> | <b>7,431,400,348</b>   |
| <b>101 Layanan Umum</b>   | <b>7,844,720,000</b>   | <b>0</b>    | <b>413,319,652</b>   | <b>5.27%</b>  | <b>1,354,611,208</b>  | <b>17.27%</b> | <b>7,431,400,348</b>   |
| <b>101.0A Layanan Rumah Tangga Pimpinan</b>   | <b>3,841,627,000</b>   | <b>0</b>    | <b>315,278,652</b>   | <b>8.21%</b>  | <b>1,024,923,814</b>  | <b>26.68%</b> | <b>3,526,347,348</b>   |
| <b>101.0B Layanan Dukungan Kesekretariatan</b>  | <b>3,064,880,000</b>   | <b>0</b>    | <b>58,040,000</b>    | <b>1.89%</b>  | <b>286,387,394</b>    | <b>9.34%</b>  | <b>3,006,840,000</b>   |
| <b>101.0C Layanan Tata Usaha Biro</b>   | <b>330,560,000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>330,560,000</b>     |
| <b>101.0D Layanan Tata Usaha Pimpinan</b>   | <b>298,413,000</b>     | <b>0</b>    | <b>40,000,000</b>    | <b>13.40%</b> | <b>41,800,000</b>     | <b>14.01%</b> | <b>258,413,000</b>     |
| <b>101.0E Layanan Persuratan dan Kearsipan</b>  | <b>309,240,000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>1,500,000</b>      | <b>0.49%</b>  | <b>309,240,000</b>     |
| <b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>  | <b>78,698,135,000</b>  | <b>0</b>    | <b>6,614,448,565</b> | <b>8.40%</b>  | <b>16,304,740,423</b> | <b>20.72%</b> | <b>72,083,686,435</b>  |
| <b>001 Gaji dan Tunjangan</b>   | <b>62,254,305,000</b>  | <b>0</b>    | <b>5,404,786,565</b> | <b>8.68%</b>  | <b>13,276,593,795</b> | <b>21.33%</b> | <b>56,849,518,435</b>  |
| <b>001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan</b>   | <b>62,254,305,000</b>  | <b>0</b>    | <b>5,404,786,565</b> | <b>8.68%</b>  | <b>13,276,593,795</b> | <b>21.33%</b> | <b>56,849,518,435</b>  |
| <b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>  | <b>16,443,830,000</b>  | <b>0</b>    | <b>1,209,662,000</b> | <b>7.36%</b>  | <b>3,028,146,628</b>  | <b>18.42%</b> | <b>15,234,168,000</b>  |
| <b>002.0A Administrasi Kegiatan</b>   | <b>1,224,388,000</b>   | <b>0</b>    | <b>114,350,000</b>   | <b>9.34%</b>  | <b>198,934,000</b>    | <b>16.25%</b> | <b>1,110,038,000</b>   |
| <b>002.0B Terpeliharanya Kendaraan</b>  | <b>2,248,257,000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>162,704,400</b>    | <b>7.24%</b>  | <b>2,248,257,000</b>   |
| <b>002.0C Terbayarnya Layanan Telepon dan Listrik</b>   | <b>906,000,000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>35,000,000</b>     | <b>3.86%</b>  | <b>906,000,000</b>     |
| <b>002.0D Tenaga Teknis Lainnya</b>   | <b>6,120,340,000</b>   | <b>0</b>    | <b>537,352,000</b>   | <b>8.78%</b>  | <b>1,612,056,000</b>  | <b>26.34%</b> | <b>5,582,988,000</b>   |
| <b>002.0E Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                             | <b>5,890,095,000</b>   | <b>0</b>    | <b>557,960,000</b>   | <b>9.49%</b>  | <b>1,019,452,228</b>  | <b>17.34%</b> | <b>5,322,135,000</b>   |
| <b>002.0F Pelantikan Jabatan</b>  | <b>64,750,000</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>64,750,000</b>      |
| <b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>  | <b>1,314,054,000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>1,314,054,000</b>   |
| <b>EBB.951 Layanan Sarana Internal</b>  | <b>1,314,054,000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>1,314,054,000</b>   |
| <b>101 Layanan Sarana Internal</b>  | <b>1,314,054,000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>1,314,054,000</b>   |
| <b>101.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</b>  | <b>1,314,054,000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>1,314,054,000</b>   |
| <b>EBC Layanan Manajemen SDM Internal</b>   | <b>1,887,686,000</b>   | <b>0</b>    | <b>15,187,500</b>    | <b>0.80%</b>  | <b>109,537,803</b>    | <b>5.80%</b>  | <b>1,872,498,500</b>   |
| <b>EBC.954 Layanan Manajemen SDM</b>  | <b>1,887,686,000</b>   | <b>0</b>    | <b>15,187,500</b>    | <b>0.80%</b>  | <b>109,537,803</b>    | <b>5.80%</b>  | <b>1,872,498,500</b>   |
| <b>101 Layanan Manajemen SDM Internal</b>   | <b>1,887,686,000</b>   | <b>0</b>    | <b>15,187,500</b>    | <b>0.80%</b>  | <b>109,537,803</b>    | <b>5.80%</b>  | <b>1,872,498,500</b>   |
| <b>101.0A Layanan Manajemen SDM</b>   | <b>397,606,000</b>     | <b>0</b>    | <b>1,937,500</b>     | <b>0.49%</b>  | <b>56,037,803</b>     | <b>14.09%</b> | <b>395,668,500</b>     |
| <b>101.0B Layanan Pendidikan dan Pelatihan</b>  | <b>1,228,930,000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>22,500,000</b>     | <b>1.83%</b>  | <b>1,228,930,000</b>   |
| <b>101.0C Layanan Koordinasi dan Pembinaan kegiatan Organisasi, SDM dan Hubungan</b>                    | <b>261,150,000</b>     | <b>0</b>    | <b>13,250,000</b>    | <b>5.07%</b>  | <b>31,000,000</b>     | <b>11.87%</b> | <b>247,900,000</b>     |
| <b>EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>   | <b>9,523,226,000</b>   | <b>0</b>    | <b>799,296,044</b>   | <b>8.39%</b>  | <b>1,364,003,369</b>  | <b>14.32%</b> | <b>8,723,929,566</b>   |
| <b>EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>   | <b>5,329,682,000</b>   | <b>0</b>    | <b>85,935,593</b>    | <b>1.61%</b>  | <b>278,221,748</b>    | <b>5.22%</b>  | <b>5,243,746,407</b>   |
| <b>101 Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>   | <b>5,329,682,000</b>   | <b>0</b>    | <b>85,935,593</b>    | <b>1.61%</b>  | <b>278,221,748</b>    | <b>5.22%</b>  | <b>5,243,746,407</b>   |
| <b>101.0A Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>  | <b>5,329,682,000</b>   | <b>0</b>    | <b>85,935,593</b>    | <b>1.61%</b>  | <b>278,221,748</b>    | <b>5.22%</b>  | <b>5,243,746,407</b>   |
| <b>EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>  | <b>771,904,000</b>     | <b>0</b>    | <b>32,379,267</b>    | <b>4.19%</b>  | <b>68,836,117</b>     | <b>8.92%</b>  | <b>739,524,733</b>     |
| <b>101 Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>  | <b>771,904,000</b>     | <b>0</b>    | <b>32,379,267</b>    | <b>4.19%</b>  | <b>68,836,117</b>     | <b>8.92%</b>  | <b>739,524,733</b>     |
| <b>101.0A Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>   | <b>771,904,000</b>     | <b>0</b>    | <b>32,379,267</b>    | <b>4.19%</b>  | <b>68,836,117</b>     | <b>8.92%</b>  | <b>739,524,733</b>     |
| <b>EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan</b>   | <b>1,094,046,000</b>   | <b>0</b>    | <b>262,052,900</b>   | <b>23.95%</b> | <b>287,619,900</b>    | <b>26.29%</b> | <b>831,993,100</b>     |
| <b>101 Layanan Manajemen Keuangan</b>   | <b>1,094,046,000</b>   | <b>0</b>    | <b>262,052,900</b>   | <b>23.95%</b> | <b>287,619,900</b>    | <b>26.29%</b> | <b>831,993,100</b>     |
| <b>101.0A Layanan Perbendaharaan</b>  | <b>378,141,000</b>     | <b>0</b>    | <b>98,052,900</b>    | <b>25.93%</b> | <b>104,708,900</b>    | <b>27.69%</b> | <b>280,088,100</b>     |
| <b>101.0B Layanan Akuntansi dan Verifikasi</b>  | <b>383,850,000</b>     | <b>0</b>    | <b>70,000,000</b>    | <b>18.24%</b> | <b>81,717,000</b>     | <b>21.29%</b> | <b>313,850,000</b>     |
| <b>101.0C Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)</b>                              | <b>182,734,000</b>     | <b>0</b>    | <b>30,000,000</b>    | <b>16.42%</b> | <b>32,220,000</b>     | <b>17.63%</b> | <b>152,734,000</b>     |
| <b>101.0D Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan</b>                                    | <b>149,321,000</b>     | <b>0</b>    | <b>64,000,000</b>    | <b>42.86%</b> | <b>68,974,000</b>     | <b>46.19%</b> | <b>85,321,000</b>      |
| <b>EBD.965 Layanan Audit Internal</b>   | <b>2,327,594,000</b>   | <b>0</b>    | <b>418,928,284</b>   | <b>18.00%</b> | <b>729,325,604</b>    | <b>31.33%</b> | <b>1,908,665,716</b>   |
| <b>101 Layanan Audit Internal</b>   | <b>2,327,594,000</b>   | <b>0</b>    | <b>418,928,284</b>   | <b>18.00%</b> | <b>729,325,604</b>    | <b>31.33%</b> | <b>1,908,665,716</b>   |
| <b>101.0A Layanan Internal</b>  | <b>406,834,000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>18,350,000</b>     | <b>4.51%</b>  | <b>406,834,000</b>     |
| <b>101.0B Audit pada Satek lingkup Badan Pangan Nasional</b>  | <b>560,000,000</b>     | <b>0</b>    | <b>86,228,135</b>    | <b>15.40%</b> | <b>220,767,715</b>    | <b>39.42%</b> | <b>473,771,865</b>     |
| <b>101.0C Revisi kegiatan mandatory dan kegiatan strategis pada satek lingkup Badan Pangan Nasional</b> | <b>224,000,000</b>     | <b>0</b>    | <b>100,863,864</b>   | <b>45.03%</b> | <b>115,642,364</b>    | <b>51.63%</b> | <b>123,136,136</b>     |
| <b>101.0D Tindak lanjut Hasil Pengawasan Internal/ External</b>   | <b>152,000,000</b>     | <b>0</b>    | <b>10,545,100</b>    | <b>6.94%</b>  | <b>10,545,100</b>     | <b>6.94%</b>  | <b>141,454,900</b>     |
| <b>101.0E Peningkatan mutu pelayanan satek pada unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional</b>            | <b>67,460,000</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>261,000</b>        | <b>0.39%</b>  | <b>67,460,000</b>      |
| <b>101.0F Peningkatan mutu pelayanan satek pada unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional</b>            | <b>120,000,000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>120,000,000</b>     |
| <b>101.0G Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis/Prioritas</b>                          | <b>240,000,000</b>     | <b>0</b>    | <b>221,291,185</b>   | <b>92.20%</b> | <b>237,852,185</b>    | <b>99.11%</b> | <b>18,708,815</b>      |
| <b>101.0H Penyusunan NSPK</b>   | <b>61,300,000</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>61,300,000</b>      |
| <b>101.0I Revisi Bantuan Pangan</b>   | <b>496,000,000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>125,907,240</b>    | <b>25.38%</b> | <b>496,000,000</b>     |
| <b>PAD Peraturan Presiden</b>   | <b>270,775,000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>270,775,000</b>     |
| <b>PAD.001 RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional</b>   | <b>270,775,000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  | <b>270,775,000</b>     |
| <b>101 Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional</b>  |                        |             |                      |               |                       |               |                        |